

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Rembang berada di bagian paling timur laut Provinsi Jawa Tengah, memiliki bentang alam pesisir yang kaya akan potensi wisata. Daya tarik kawasan ini terletak pada beragam tujuan wisatanya, yang menarik pengunjung untuk mencari pengalaman unik. Menambah aksesibilitasnya, Kabupaten Rembang bersinggungan dengan Jalan Pantai Utara Jawa yang biasa dikenal dengan jalur Pantura. Jalur strategis yang melintasi Kabupaten Rembang ini pariwisata dan memantapkan posisinya di titik paling timur laut Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki banyak akses untuk menuju ke tempat wisata. Hal ini menjadi suatu keuntungan bagi Kabupaten Rembang dalam pengembangan pariwisata sehingga menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada berbagai macam kategori pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang. Lihat tabel 1.1. berikut:

**Table 1.1 Objek Wisata di Kabupaten Rembang**

No	Kategori	2020	2021	2022
1	Objek Wisata Budaya	2	2	2
2	Objek Wisata Bahari	10	11	11
3	Objek Wisata Cagar Alam	3	3	3
4	Objek Wisata Alam	2	3	4
5	Objek Wisata Sejarah	8	8	8
6	Objek Wisata Religi	4	4	4
7	Objek Wisata Pendidikan	3	3	3
8	Objek Wisata Kuliner	3	4	5
9	Objek Wisata Belanja	1	1	1
10	Objek Wisata Buatan	10	10	10
Jumlah		46	49	51

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang

Tabel 1.1 menjelaskan tahun demi tahun, terjadi peningkatan objek wisata di Kabupaten Rembang yang berarti wisata di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup baik sehingga dapat menambah jumlah wisatanya.

Rabtetadung (2012) menyatakan bahwa PAD atau Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan, bisnis pariwisata mampu berkembang dan menarik masyarakat untuk berwisata. Dalam industri pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan memiliki signifikansi yang besar sebagai penanda keberhasilan atau kegagalan suatu destinasi. Berikut jumlah wisatawan. Lihat table 1.2 berikut.

**Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Rembang**

No	Kategori	2020	2021	2022
1	Wisatawan Domestik	944.879	1.046.174	1.825.977
2	Wisatawan Mancanegara	11	6	20

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 1.2 dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Rembang yang berarti wisata di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup baik sehingga dapat menambah jumlah wisatawannya.

Daerah pesisir Kabupaten Rembang memiliki beberapa wisata unggulan dan sudah dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara adalah Pantai Pasir Putih Wates. Pantai Wates mempunyai visi terwujudnya sapta pesona dalam kehidupan

masyarakat Tasikharjo yang aktif dan mandiri, dan mempunyai misi yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang partisipatif dalam kegiatan intern maupun ekstern, mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, indah, tertib dan bersih, mengembangkan daya tarik (potensi desa) dalam berbagai bidang, meningkatkan peranan generasi muda dalam pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat yang berwawasan pariwisata, membangun insan yang terampil berwiraswasta.

Salah satu kecamatan yang berada di pesisir dan di sebelah utara jalan pantura adalah Pantai Pasir Putih Wates. Pantai ini merupakan tempat wisata yang salah satunya memiliki keindahan alam, seperti lautan, pasir putih yang masih bersih, dan juga keindahan pohon mangrove serta tembakau yang indah. Desa Wisata Pantai Pasir Putih Wates Tasikharjo merupakan wisata bahari yang terletak di kawasan pesisir pantai utara Pulau Jawa, yang jaraknya 4 km dari Kabupaten Rembang. Pantai ini dekat dengan jalan pantura, aman, tertib, sejuk, bersih, terjangkau dan indah. Banyak lokasi foto yang bagus dan menarik untuk remaja. Serta banyak tempat-tempat rindang untuk kumpul bersama keluarga dan menikmati keindahan pantainya. Berikut gambar 1.1 Pantai Pasir Putih Wates Tasikharjo.

**Gambar 1.1 Pantai Pasir Putih Wates**



Sumber: Pengelola Pantai Pasir Putih Wates

Gambar di atas menggambarkan wisata Pantai Pasir Putih mempunyai keindahan alam yang bagus dan juga pantai yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah ramah, nyaman. Wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pasir Putih Wates semenjak Pandemi Covid-19 sangat menurun mulai Akhir Tahun 2019 sampai sekarang pengunjungnya tidak 100% tetapi paling banyak hanya 80% saja. Berikut tabel jumlah wisatawan Pantai Pasir Putih Wates.

**Tabel 1.3 Tabel Jumlah Wisatawan Pantai Pasir Putih Wates**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Januari	18,211	37,896	11,896	43,700
Februari	19,471	21,608	3,865	21,896
Maret	22,393	11.944	22,504	20,328
April	29,383	0	17,991	48,600
Mei	39,031	0	0	136,742
Juni	33,839	0	0	25,868
Juli	36,475	0	0	19,286
Agustus	25,540	0	0	22,564
September	25,372	35,475	19,274	27,188
Oktober	27,125	29,298	43,054	26,636
November	35,496	29,298	24,330	22,386
Desember	48,776	16,658	39,508	22,460
Jumlah	361,102	169,517	182,380	437,654

Sumber: Pengelola Pantai Pasir Putih Wates

Tabel 1.3 pada tahun 2019 mencatat peningkatan kunjungan wisatawan ke Pantai Pasir Putih Wates, namun dampak pandemi COVID-19 dari tahun 2020 hingga 2021 menyebabkan penurunan kunjungan yang signifikan. Peningkatan jumlah wisatawan pasca pandemi mengalami peningkatan yang pesat yaitu dari 182,380 menjadi 437,654.

Potensi pariwisata yang berbeda di setiap daerah menjadikan perkembangan ekonomi juga berbeda. Pariwisata juga merupakan sektor ekonomi yang pertumbuhannya relatif cepat dan stabil. Namun, bukan hanya pertumbuhan yang

tinggi saja, pemerataan pembangunan juga harus diimbangi supaya perekonomian kembali menjadi kuat (Krongkaew dan Kakrawni, 2003). Pemerataan pembangunan pariwisata masih bergantung terhadap potensi pariwisata di daerah tersebut. Jika semua pihak dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah untuk pembangunan pariwisata, maka daerahnya dapat menarik wisatawan, terutama di Kabupaten Rembang yang memiliki banyak tempat menarik. Awal mula terbentuknya wisata Pantai Pasir Putih Wates yaitu pertengahan Tahun 2016 Pihak Dinas Perhutanan mengajak karang taruna Desa Tasikharjo untuk menanam pohon cemara. Dalam waktu kurang lebih empat bulan tanaman pohon cemara sudah kelihatan bagus lalu masyarakat mempunyai ide untuk membuka wisata. Masyarakat membuka wisata yang bertujuan untuk mengapresiasi keindahan pohon cemara.

Permasalahan yang dihadapi Pantai Pasir Putih Wates saat ini yaitu yang pertama kurangnya alokasi dana yang menyebabkan kurang maksimalnya sarana dan prasarana. Dalam Pasal 1 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019–2025 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019, secara tegas didefinisikan fasilitas pariwisata. Berdasarkan peraturan tersebut, fasilitas tersebut mencakup berbagai tempat yang dirancang untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan pengunjung destinasi pariwisata daerah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan sarana umum, prasarana, dan usaha yang berkaitan dengan pariwisata dijelaskan dalam Pasal 31, 32, dan 33 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 bagian

kelima. Pasal 31 menguraikan orientasi kebijakan bagi kemajuan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 huruf d. Ruang lingkup arahan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan infrastruktur publik, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, yang bertujuan untuk mendorong kemajuan inovatif destinasi pariwisata daerah. Sasarannya juga mencakup peningkatan infrastruktur publik, peningkatan kualitas fasilitas umum dan pariwisata untuk menganalisis pertumbuhan, meningkatkan daya saing dan kualitas destinasi pariwisata regional, dan memfasilitasi kegiatan Pertemuan, Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE) dalam lingkup wilayah. Menurut Pasal 33, ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi landasan bagi insentif yang diberikan bagi pengembangan prasarana, sarana, dan daya tarik wisata umum. Sementara itu, ayat (1) pasal 32 menyatakan: Meningkatkan kualitas infrastruktur publik dan fasilitas pariwisata umum, mendorong perluasan, dan meningkatkan daya saing destinasi regional, dan mendorong inovasi dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah. Selain itu, pengelolaan infrastruktur publik dan pembangunan fasilitas umum dan pariwisata di daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung, dan penunjang kegiatan MICU di daerah juga turut serta.

Kenyataan dalam pariwisata Pantai Pasir Putih Wates belum optimalnya sumber anggaran dilihat dari APBD Kabupaten Rembang akhir-akhir ini mengalami carut marut, APBD Rembang carut marut realisasi silpa melesat

kebutuhan belanja kurang Rp. 143 Miliar. (2, 2023). Hal tersebut berpengaruh dalam pengembangan pariwisata.

Pantai Pasir Putih Wates belum ada fasilitas transportasi seperti mobil, bus, elf untuk wisatawan yang akan berwisata serta banyak sarana dan prasarana yang kurang memenuhi standar. Sarana dan prasarana dalam pariwisata sangat diperlukan dalam sebuah pariwisata. Di dalam wisata Pantai Pasir Putih ini sarana prasarananya kurang maksimal dan banyak spot-spot foto dan juga mainan anak-anak yang sudah rusak sehingga dapat membahayakan wisatawan. Berikut foto-foto sarana prasarana yang sudah rusak di Pantai Pasir Putih Wates. Gambar berikut menunjukkan infrastruktur dan perlengkapan yang rusak di Pantai Pasir Putih Wates.

**Gambar 1.2 Gambar sarana dan prasarana**



Sumber: Gambar Penulis 28/11/2023



Gambar di atas menunjukkan bahwa fasilitas atau sarana dan prasarana di Pantai Pasir Putih Wates banyak yang mengalami kerusakan. Seperti gambar diatas tulisan dermaga cinta yang sudah berkarat, ayunan yang sudah tidak ada papan dan sudah berkarat, tempat duduk bersantai yang sudah hilang kayunya dan terdapat paku serta jembatan dermaga cinta sudah banyak yang rusak.

Ketiga kurangnya fasilitas kebersihan yaitu tidak ada tempat pembuangan sementara sehingga kesulitan mengkondisikan sampah atau limbah pariwisatanya. Di dalam pariwisata tidak jauh dari limbah sampah hal ini disebabkan banyaknya wisatawan yang berkunjung dan membeli makanan sehingga terdapat limbah dan sampah. jika sebuah pariwisata tidak ada pembuangan sementara maka sangat sulit mengkondisikan sampahnya dan sangat mengganggu keindahan Pantai Pasir Putih Wates. Berikut foto tempat pembuangan sampah di tambak warga.

### **Gambar 1.3 Tempat Pembuangan Sementara**



Sumber: Gambar Penulis 18/11/2023

Tempat pembuangan sementara di Pantai Pasir Putih Wates di atas yaitu di tambak warga, hal tersebut disebabkan karena Pantai ini belum mempunyai lahan pembuangan sementara.

Keempat masalah dalam pengembangan pariwisata Pantai Pasir Putih Wates yang paling besar yaitu dampak lingkungan yaitu abrasi. Selain itu jika terjadi reklamasi di sekitar Rembang pasti Pantai Pasir Putih Wates ini yang menjadi salah satu yang menjadi dampak bagi pantainya. Dampak terberat limbah ini yang paling parah yaitu tahun 2017 dimana pantai menjadi bau dan keruh yang disebabkan oleh banyaknya biota laut yang mati sehingga airnya menjadi bau serta kalau terkena kulit bisa menjadi masalah bagi struktur kulit seperti gatal, iritasi dan sebagainya. Beberapa perusahaan pengolahan ikan di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, melakukan pembuangan limbah yang tidak tepat, menyebabkan pencemaran Pantai Pasir Putih Wates di Desa Tasikharjo. Detikcom melaporkan pada hari Kamis, 2 November 2017, bahwa pencemaran telah terjadi di pesisir pantai, mulai dari Desa Banyudono hingga Desa Tasikharjo, yang berbatasan dengan Kabupaten Kota Rembang. Praktik pembuangan limbah sembarangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini telah menyebabkan degradasi lingkungan, memberikan dampak negatif terhadap wilayah pesisir dan memerlukan intervensi dan upaya perbaikan segera. (syaefudin, 2017). Berikut gambar limbah Pantai Pasir Putih.

### **Gambar 1.4 Pantai Tercemar Limbah**



Sumber: (syaefudin, 2017)

Gambar di atas menunjukkan terdapat lumpur ditepi pantai yang menyebabkan air pantai tidak bisa jernih. Limbah tersebut disebabkan dari pabrik-pabrik ikan yang tempatnya berdekatan dengan pantai tersebut sehingga Pantai Pasir Putih Wates terkena imbasnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang perkembangan pariwisata Pantai Pasir Putih Wates melalui penelitian yang berjudul **“Implementasi kebijakan pengembangan aksesibilitas pariwisata Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dengan mempertimbangkan konteks masalah di atas, masalah-masalah berikut dapat diidentifikasi:

1. Kurangnya alokasi dana atau sumber pendanaan pengembangan Pantai Pasir Putih Wates sehingga menyebabkan kurang maksimalnya sarana dan prasarana
2. Belum ada fasilitas transportasi pariwisata Pantai Pasir Putih Wates
3. Tidak ada tempat pembuangan sementara sehingga pengelola Pantai Pasir Putih Wates kesulitan mengkondisikan sampah dan limbah pariwisatanya.
4. Adanya dampak lingkungan abrasi dan kalau ada reklamasi di sekitar rembang pasti Pantai Pasir Putih Water ini yang menjadi salah satu yang menjadi dampak bagi pantainya.

### **1.2.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan informasi di atas, rumusan masalah berikut dapat ditarik:

1. Bagaimana Implementasi Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang?
2. Apa Faktor Penghambat Dan Pendorong Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Implementasi Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang.

2. Untuk Menganalisis Faktor Penghambat Dan Pendorong Implementasi Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian terletak pada konsekuensi pencapaian suatu tujuan. Penggambaran dan wacana dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoristis**

Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai cara untuk belajar dan memperoleh pengalaman baru. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk metode penelitian dan perbandingan penelitian berikutnya..

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Peneliti dapat memperoleh wawasan dan mengumpulkan keahlian tambahan dari penelitian ini. Selain itu, penyelidikan ini dapat bertindak sebagai standar untuk perbandingan dan referensi di masa depan.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan pelayanan kepada masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai inisiatif pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang (DISBUDPAR), khususnya di Pantai Pasir Putih Wates.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat untuk peningkatan kualitas pariwisata dan sebagai tolak ukur untuk mengimplementasikan pengembangan Pantai Pasir Putih Wates supaya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedepan.

## 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahmad Hanif Nur R, Dyah Lituhayu, Titik Djumiarti (2022)	“Strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Semarang untuk Objek Wisata Palagan Ambarawa”	Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Penyelenggaraan pariwisata kebijakan pembangunan di Kabupaten Semarang di Palagan Ambarawa belum sepenuhnya berjalan diimplementasikan dengan sukses. Jika dilihat dari standar dan tujuan kebijakan, pariwisata Pembangunan di Palagan Ambarawa belum tercapai secara maksimal. Lalu ada juga beberapa kendala seperti kurangnya tenaga kerja, kurangnya anggaran, dan pandemi Covid-19 yang menghambat implementasi kebijakan. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dapat bekerjasama dengan perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Semarang, guna mendapatkan hal tersebut bantuan anggaran dalam melaksanakan pengembangan pariwisata.
2	Kariaman sinaga, M.Amri Nasution, Ayu Trisna Dewi (2021)	“Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kebijakan Pariwisata”	Deskriptif kualitatif	Temuan penelitian mengungkapkan adanya kekurangan dalam koordinasi dan komunikasi pada saat proses pelaksanaan antara Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pengambilan keputusan yang tidak tepat, yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip implementasi yang telah ditetapkan.
3	Fahri Juarsa Muhammad, Ira Irawati, Mas Halimah (2022)	“Implementasi Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kota Manado melalui Kebijakan”	Pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan Teknik qualitative observation, qualitative interview dan qualitative document.	Wisata kota di Manado saat ini sedang mengalami pembangunan infrastruktur destinasi wisata yang sedang berlangsung. Berbagai pemangku kepentingan terlibat aktif dalam revitalisasi lokasi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung berdampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memberikan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) internal dan eksternal. Masyarakat terus berperan penting dalam memberikan masukan dan kritik terhadap pengembangan pariwisata di Kota Manado. Keterlibatan tersebut kini dalam tahap konsultasi dengan Dinas Pariwisata Kota Manado. Selain itu, terpuruknya perekonomian Kota Manado khususnya di sektor pariwisata juga terlihat serta memberikan tantangan yang signifikan. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada koordinasi berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan untuk penyelenggaraan acara pariwisata yang efektif di kota.



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Ekel (2020)	“Implementasi Kebijakan Agrowisata untuk Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan”	Deskriptif kualitatif	Pengungkapan penelitian ini menunjukkan bahwa petani hortikultura di Distrik Modoinding dihadapkan pada tantangan dalam mendapatkan dana yang diperlukan untuk perkebunan mereka. Bantuan pemerintah yang kurang mampu menutup biaya pemeliharaan kebun menyebabkan petani terpaksa meminjam uang ke bank melalui KUR. Akibatnya, mereka meminta pemerintah untuk berkomitmen memberikan bantuan besar guna memfasilitasi pengembangan produksi pertanian mereka yang lebih nyaman. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas tanaman, khususnya sayuran, para petani hortikultura di Distrik Modoinding mengungkapkan keinginan agar pemerintah daerah mengadakan program pendidikan bagi para petani, dengan fokus pada teknik pertanian yang modern dan efektif.
5	Titi Nur Maulida, Aloysius Rengga, Ari Subowo	“Pengembangan Destinasi Pariwisata Di Widuri Park Kabupaten Pematang”	Kualitatif deskriptif	Studi ini menggambarkan tantangan dalam implementasi Program Pengembangan Destinasi Widuri Water Park di sektor pariwisata. Permasalahan yang masih terjadi terkait dengan kendala perencanaan dan anggaran telah menghambat efektivitas dan optimal pelaksanaan program.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	A Diaindarwati, Budi Setiawan, Jaelan Usman (2023)	“Implementasi Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar untuk Pengembangan Objek Wisata Pantai”	Kualitatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar telah mengimplementasikan kebijakan untuk Pengembangan Objek Wisata Pantai mengalami evaluasi menyeluruh pada berbagai aspek krusial. Praktik komunikasi yang patut dipuji dari Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar menonjol karena strukturnya yang baik kantor resminya secara konsisten memprioritaskan komunikasi yang efektif di berbagai departemen. Komitmen ini memastikan bahwa operasional secara ketat mematuhi Prosedur Operasi Standar (SOP), sehingga menghasilkan layanan berkualitas tinggi. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mendapat pujian atas efektivitas penyediaan sumber daya alam di setiap objek wisata. Pendekatan proaktif ini memastikan bahwa setiap tujuan wisata memiliki fitur alam yang menawan, sehingga secara efektif menarik minat wisatawan. Kedisiplinan yang tinggi ditunjukkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar merupakan aspek penting dalam evaluasi ini. Karyawan di setiap kantor menjalani pelatihan tentang kebijakan pengembangan pariwisata khusus untuk Kota Makassar, sehingga menumbuhkan suasana

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>yang mendukung sehingga berkontribusi pada efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, struktur birokrasi kantor resmi dinilai terpuji karena mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi efisiensi operasional dan keberhasilan implementasi kebijakan. Singkatnya, evaluasi komprehensif menggarisbawahi atribut positif dalam komunikasi, Struktur birokrasi, jumlah staf, dan sumber daya yang tersedia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi terhadap efektivitas Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai secara keseluruhan telah diterapkan sesuai dengan sistem yang ditetapkan langsung dari pusat</p>
7	Dzakiyah Adalatul Hikmah, Khusnul Prasetyo, Eka Arum Pramestya	“Penerusan Kebijakan Surabaya Pengembangan Pariwisata Kota Surabaya melalui Interaksi Kultural Internasional”	Kualitatif deskriptif	<p>Dalam penelitian ini, terlihat bahwa indikator kebijakan yang diusulkan oleh Van Meter dan Van Horn berhasil diterapkan, meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis. Tantangan-tantangan ini mencakup penetapan standar dan tujuan kebijakan, serta penggabungan sikap, sumber daya, dan karakteristik. Di samping itu, penelitian ini mengulas tentang bantuan bagi organisasi dalam berkomunikasi satu sama lain serta mengelola interaksi yang kompleks dengan lingkungan politik, ekonomi, dan sosial.</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara sektor publik, swasta, dan komunitas, yang menunjukkan upaya sinergis yang berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan acara Surabaya Cross Culture International. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor ini memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan dan memastikan penerapan indikator kebijakan yang diusulkan secara efektif.
8	(Munir et al., 2019)	“Implementasi Strategi untuk Pengembangan Pariwisata Pulau Lombok”	Deskriptif Kualitatif	Empat pilar peraturan daerah, seperti yang disarankan oleh analisis kebijakan, menentukan arah kemajuan pariwisata Pulau Lombok. Pengembangan pariwisata, strategi pemasaran, pengelolaan bisnis, dan pembentukan institusi termasuk di dalamnya. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya memberikan dampak yang diharapkan hasil yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Lombok. Sebaliknya, hal ini justru menimbulkan tantangan-tantangan baru bagi lapisan masyarakat sosio-ekonomi rendah.
9	Widyanarko (2020)	“Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo Mengembangkan Industri Pariwisata Berkelanjutan	Deskriptif kualitatif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa kebijakan pariwisata yang ramah lingkungan diterapkan di Kabupaten Ponorogo masih belum mencapai standar

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		yang Berwawasan Lingkungan”		ideal. Ketidakcukupan ini tampak pada belum optimalnya pelaksanaan komponen-komponen penting implementasi kebijakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. Komponen tersebut meliputi struktur birokrasi, dispoisi, sumber daya, dan komunikasi.
10	Wicaksana (2019)	“Strategi Pengembangan Wisata di Desa Sawarna, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten”	Deskriptif kualitatif	Temuan analisis menunjukkan berbagai tantangan penting dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lebak. Tantangan-tantangan ini mencakup kurangnya personel yang berkualitas dan berpengalaman di industri pariwisata, tidak mengganggu kinerja sektor ini secara keseluruhan adalah kerusakan sarana dan prasarana, khususnya jaringan transportasi dan akses jalan menuju lokasi wisata. Selain itu, terdapat kekurangan yang cukup besar dalam koordinasi lintas lembaga dan lintas aktor, sehingga semakin memperparah kendala yang dihadapi sektor pariwisata di Kabupaten Lebak.
11	Entin Kartini, Iwan Hermawan, Fajar Kurniawan, M. Aksal Satria, Ananda Dwinur Permata (2022)	“Strategi Pelindung Anak dalam Kota Bandung, Indonesia”	Kualitatif	Tantangan yang ada telah menghambat implementasi sistem peradilan pidana dan proses pelayanan, sehingga menghambat keberhasilan pelaksanaan upaya perlindungan anak. Penting bagi para pemangku kepentingan untuk

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				mengintensifkan upaya mereka menangani efek pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Kabupaten ini
12	Mahadiansar, Andy Fefra Wijaya, Alfi Haris Wanto, Firda Hardayanti (2021)	“Contents of Policy and Context of Implementation in the Tourism Sector: Case of Bintam Regency to Handling Covid-19”	kualitatif	Hal ini memerlukan fokus pada sisi isi kebijakan, yang harus mencakup kepentingan Faktor-faktor yang terdampak, jenis manfaat, tingkat perubahan, lokasi pelaksanaan program, pengambilan keputusan, serta sumber daya yang terpakai. Kepatuhan terhadap undang-undang dan pedoman federal sangat penting untuk mencegah perwakilan pemerintah daerah memulai rencana kebijakan secara mandiri untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh COVID-19 di industri pariwisata Kabupaten Bintan. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, upaya terpuji telah ditunjukkan dalam mengelola dampak COVID-19 secara efektif terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bintan
13	Sri Nurhayati Qodriyatun (2018)	“Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimun Jawa”	Kualitatif	Penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2018 terhadap perluasan industri pariwisata Karimunjawa menunjukkan bahwa industri tersebut belum mencapai keberlanjutan. Namun, dampaknya adalah peningkatan ekonom lokal melalui pembukaan peluang pekerjaan baru dan peningkatan pendapat, terdapat juga dampak

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>buruk terhadap lingkungan dan nilai-nilai sosial. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan sangatlah penting. Rencana yang diusulkan meliputi pengukuran kapasitas ekologis, fisik, dan sosial., serta peningkatan pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan. Selain itu, mereka juga menganjurkan penerapan analisis dampak lingkungan seperti studi AMDAL atau UKL/UPL. Semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dijelaskan dalam rencana tersebut tentang langkah-langkah yang harus diambil di Karimunjawa. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.</p>
14	Ida Aayu Diah Laksmi Gayatri (2021)	“Implementasi Strategi Perjalanan ASEAN dalam Pembangunan Pariwisata Sumatera Barat”	Deskriptif kualitatif	Meski menghadapi berbagai kendala, Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan untuk mengembangkan pariwisata di kawasan Nusa Penida berjalan lancar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan untuk memperkuat prasarana dan sarana pendukung, memperluas potensi alam yang belum dimanfaatkan, dan meningkatkan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				kualitas sumber daya manusia. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan berkelanjutan pembangunan pariwisata di wilayah tersebut.
15	Haiyyu Darman Moenir, Abdul Halim, Ajeng Masna Ridamida Maharani (2021)	“Strategi Pengembangan Pariwisata Kawasan Penida Di Kabupaten Kalungkung, Provinsi Bali”	Kualitatif	Dalam konteks kerangka ATSP (Accelerated Tourism Strategic Plan) pengembangan pariwisata daerah, peneliti bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Sumatera Barat. Namun temuan studi menunjukkan bahwa Pemerintah Sumbar belum sepenuhnya melaksanakan ATSP dan belum mengoptimalkan potensi daerah di sektor pariwisata. Ada ruang untuk perbaikan dalam menyelaraskan strategi dengan kerangka ATSP untuk membuka seluruh potensi pariwisata Sumatera Barat

**Sumber: Analisis Peneliti**



Penelitian diatas telah dianalisis, dan dari hasilnya ada beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kesamaan antara penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu berfokus pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, serta metode yang digunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitiannya dimana lokasi ini yaitu di Kota Rembang yang tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya penelitian ini adalah pariwisata yang dikelola oleh Desa hal ini yang membedakan dari penelitian sebelumnya. Pendanaan pengembanganya dari dana Desa, retribusi parkir, DPR, APBN, APBD, dan dana swadaya.

### **1.5.2 Administrasi Publik**

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (1998: 29-30) adalah proses sumber daya yang dikoordinasikan dalam hal formulasi, implementasi, dan pertimbangan keputusan. (yusuf, 2023). Ilmu dan seni untuk mengatur dan melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dalam upaya menyelesaikan masalah publik, administrasi publik fokus pada penyempurnaan, terutama dalam mengelola sumber daya manusia, bidang organisasi serta keuangan termasuk juga definisi administrasi publik.

Mengutip pendapat Tracker dalam Donovan dan Jackson (1991:10) bahwa administrasi adalah proses yang berkelanjutan yang bertujuan memanfaatkan orang melalui koordinasi dan kerjasama. Kegiatan pengkoordinasian secara implisit termasuk ke dalam definisi tersebut. (rifail, 2016). Menurut Nicholas Henry (ardiansyah, 2023) menjelaskan

administrasi publik sebagai gabungan antara teori dan praktik yang kompleks dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah dan mendorong kebijakan publik untuk menanggapi kebutuhan sosial dengan lebih baik.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan administrasi publik merupakan sekelompok individu maupun Lembaga yang melakukan koordinasi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan serta memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Kaitan antara administrasi publik dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kolaborasi atau koordinasi antar pemangku kepentingan sebagai upaya pemecahan masalah dalam pengembangan pariwisata Pantai Pasir Putih Wates.

### **1.5.3 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tupoksinya. Robert Eyestone (1971;18) Definisi ini menggambarkan kebijakan publik sebagai titik sentral antara unit-unit pemerintahan dan konteksnya, namun masih ambigu karena dapat mencakup banyak bidang berbeda.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sudut pandang ini dapat mengakibatkan aktivitas yang terkait dengan kebijakan non-publik seperti perekrutan karyawan baru atau perizinan. Filsuf politik Carl Friedrich menggambarkan kebijakan publik sebagai pilihan yang diambil oleh individu, organisasi, atau pemerintah

dalam lingkungan tertentu yang menawarkan kerangka kerja dan keterlibatan dalam mencapai suatu tujuan. (Budi Winarno, 2002:16).

Pengertian publik menurut Denhardt dalam (Dwiyanto Indiahono 1009:13) ialah tata kelola publik mengacu pada seluruh entitas pemerintah yang mempunyai hak untuk menjalankan kekuasaan sebagai suatu pemerintahan, termasuk masyarakat Indonesia, yang didirikan berdasarkan UUD 1945.

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas, beberapa ahli kebijakan publik telah mencapai konsensus bahwa kebijakan publik mencakup semua upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Indonesia, sebenarnya sudah ada beberapa kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah. Kebijakan tersebut yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, kemudian pemerintah juga mengeluarkan suatu kebijakan untuk menjalankan UU tersebut dengan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.

Pembangunan pariwisata diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027. Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, mengatur

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2025, Pemerintah Daerah sangatlah berperan penting dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah, karena Pemerintah Daerah sebagai pemegang kendali kuasa serta yang mengetahui potensi-potensi di daerah tersebut.

#### **1.5.4 Implementasi Kebijakan**

Proses implementasi kebijakan memulai pelaksanaan kebijakan yang sebenarnya. Implementasi kebijakan merupakan jaminan penting bahwa peraturan pemerintah tidak hanya berhasil secara teoritis namun efektif diterapkan di lapangan. Sejalan dengan perspektif yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn dalam (Erwan dan Dyah 2015:20), implementasi kebijakan diidentifikasi sebagai suatu jenis kegiatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat, dan individu atau kelompok. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Selain itu pendapat dari Presman dan Wildavsky dalam (Eewan dan Dyah 2015:20) menjelaskan implementasi dengan beberapa kata kunci to carry out, to fulfill, to produce, dan to complete yang artinya implementasi kebijakan itu guna menyelenggarakan kebijakan, menunaikan janji-janji politik yang telah diutarakan ke publik untuk menciptakan kebijakan yang telah disusun dalam tujuan kebijakan dan guna menuntaskan misi dari tujuan kebijakan yang telah disusun. Sedangkan Dwiyanto Indiahono (2009:143) menjelaskan inti utama dalam melaksanakan kebijakan untuk

mengetahui apa yang akan terjadi kedepannya ketika suatu program/kebijakan telah dijalankan.

Dapat disarikan dari penjelasan sebelumnya bahwa proses pengambilan kebijakan melibatkan tahapan penting yaitu implementasi kebijakan. Pada tahap ini, tindakan yang diambil oleh pelaksana kebijakan untuk melaksanakan program atau kebijakan yang telah ditentukan terbukti bermanfaat dalam mencapai tujuan kebijakan. Pada saat ini, pengaruh terhadap hasil akhir kebijakan menjadi jelas.

#### **1.5.5 Aksesibilitas**

Sistem mobilitas dalam jaringan transportasi lokal sangat terkait dengan aksesibilitas. Aksesibilitas memegang peranan penting dalam mempermudah kunjungan ke lokasi wisata bagi wisatawan. Untuk merasakan keindahan tempat wisata secara utuh, pengunjung harus menavigasi ke lokasi tersebut.

Menurut summing (2000) Elemen penting dalam kegiatan pariwisata adalah aksesibilitas, yang mengacu pada pergerakan tanpa hambatan individu dari satu lokasi ke lokasi lain. Aksesibilitas fisik dan nonfisik adalah dua komponen. Ketika kita berbicara tentang bagaimana fasilitas dan infrastruktur transportasi tersedia untuk menghubungkan lokasi wisata dengan lokasi asal wisatawan, kita berbicara tentang apa yang disebut aksesibilitas fisik. Ini mencakup sarana transportasi berjadwal dan tidak berjadwal.. Sedangkan aksesibilitas nonfisik menyangkut kemudahan pencapaian melalui izin atau persetujuan.

Kemudahan akses terhadap suatu kawasan wisata sangat mempengaruhi perkembangannya. Faktor jarak dan ketersediaan sarana dan prasarana menuju kawasan wisata memegang peranan yang sangat penting. Jumlah pengunjung yang datang ke suatu tempat dipengaruhi oleh volume dan tingkat aksesibilitasnya.

### 1.5.6 Model-model Implementasi Kebijakan

**Tabel 1.5 Model-model Implementasi Kebijakan**

Van Horn dan Van Metter	Edward III	Marilee S. Grindle	Mazmanian dan Paul
Standart dan sasaran kebijakan	Komunikasi	Kekuasaan, kepentingan, dan aktor yang terlibat	Karakteristik masalah
Sumber daya	Sumber daya	Karakteristik dan Lembaga penguasa	Karakteristik kebijakan
Karakteristik agen pelaksana	Disposisi	Kepatuhan dan daya tanggap	Lingkungan kebijakan
Sikap/kecenderungan para pelaku (disposisi)	Struktur birokrasi	-	-
Komunikasi antar organisasi	-	-	-
Lingkungan ekonomi, sosial dan budaya	-	-	-

**Sumber: Analisis Peneliti**

Dari tabel di atas Berdasarkan dari kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Rembang dalam upaya pengembangan pariwisata daerah, implementasi kebijakan tersebut merupakan tugas dan wewenang dinas pariwisata Kabupaten Rembang. Dikarenakan sektor pariwisata merupakan sektor yang dirasa penting bila dilihat dari manfaatnya, salah satunya yakni sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Mengingat saat ini

pencapaian dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang belum optimal, dapat dilihat dari data yang telah dijelaskan di latar belakang di atas. Kemungkinan dalam proses implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang belum menghasilkan dampak dan terdapat manfaat yang signifikan dalam pencapaian tujuan pengembangan pariwisata ini. Nantinya dalam penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata selaku implementor dari kebijakan tersebut, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang mengatur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rembang Tahun 2019-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019. Serta menganalisis faktor-faktor dari implementasi kebijakan pengembangan pariwisata tersebut, seperti melihat faktor yang menghambat berjalannya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata tersebut menggunakan perbandingan empat model-model implementasi menurut para ahli.

#### **1.5.7 Pengembangan Pariwisata**

Berdasarkan pada pasal 8 ayat 1 dalam UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa perlunya upaya dari pemerintah daerah untuk turut serta dalam melaksanakan pengembangan pariwisata, melalui rencana induk yang tersinkronisasi dengan rencana induk nasional. Penjelasan tersebut merupakan bukti bahwa pengembangan pariwisata tanggung jawab untuk ini tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat,

melainkan juga pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya tujuan dari kebijakan tersebut, yang salah satunya ialah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengertian pariwisata menurut Norval dalam Muljadi dan Nurhayati (200: 80) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendatang di suatu wilayah, daerah, kota atau negara tertentu yang berkaitan dengan kedatangan, bertempat tinggal, serta segala aktifitas pendatang tersebut di suatu wilayah, daerah, kota atau negara tertentu.

Berdasarkan penjelasan istilah “pembangunan” dan “pariwisata” di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata merupakan proses bertahap dan sistematis. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan dan menghasilkan pariwisata yang lebih baik di masa depan, memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada masa saat ini kebutuhan manusia untuk berwisata sangatlah besar, karena manusia selalu dihadapkan pada pekerjaan yang membuat mereka merasa bosan dan membutuhkan waktu luang untuk dapat istirahat sejenak atau refreshing dari segala kesibukan urusan pekerjaan. Oleh karena itu berikut merupakan beberapa faktor yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan pariwisata yang dikemukakan oleh Fandeli (1995:50-51), antara lain yakni : adanya kemauan untuk melepaskan penat dari sibuknya pekerjaan sehari-hari, serta kemauan untuk mengubah keadaan hati dan memanfaatkan hari libur, semakin majunya pembangunan komunikasi dan transportasi, adanya kemauan untuk melihat



serta mendapatkan pengalaman baru dari wilayah atau daerah lainnya, semakin besarnya penghasilan seseorang yang kemungkinan menjadi dorongan seseorang untuk melakukan kunjungan ke suatu wilayah/negara yang jauh dari tempat tinggalnya.

Lima kriteria hal penting yang menjadi dasar dilakukannya aktivitas pariwisata, yaitu sebagai berikut : Kegiatan wisata yang dilakukan dengan tanggung jawab, yakni segala kegiatan yang dilakukan wisatawan di suatu wilayah, daerah, bertanggung jawab atas dampak pariwisata terhadap lingkungan dan budaya sekitar menjadi tanggung jawab negara, Kunjungan wisata dilakukan menuju dan/atau pada daerah yang masih asri (nature made) atau menuju dan/atau pada daerah yang diselenggarakan atas dasar konservasi alam, Wisata juga memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman dan pembelajaran tentang berbagai fenomena alam dan budaya di suatu daerah, sehingga tidak hanya untuk bisa menikmati pesona alamnya saja, Kegiatan berwisata dapat mempersembahkan bantuan dalam upaya pelestarian alam, Kegiatan pariwisata dapat bermanfaat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang pariwisata, terutama mengenai kriteria yang harus dipenuhi dalam berwisata di atas, menjadikan sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah Kabupaten Rembang. Selain menyediakan obyek pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan, juga perlu menyediakan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya, seperti akses menuju lokasi wisata, tempat

penginapan, dan segala aspek lainnya yang terkait dengan kegiatan berwisata. Selain itu juga bisa menambah inovasi-inovasi sehingga segala aktivitas wisatawan selama berwisata di Kabupaten Rembang akan menjadi lebih mudah, dan wisatawan merasa nyaman, serta dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berwisata di Kabupaten Rembang. Upaya tersebut yakni dengan melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Rembang, yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Implementasi kebijakan aksesibilitas pengembangan pariwisata dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rembang untuk periode 2019-2025 mencakup berbagai aspek pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan suatu produk atau menambah jenis produk wisata (yoeti, 2001). Pengembangan aksesibilitas pariwisata merupakan usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan sarana dan insfrastuktur untuk menuju destinasi, seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu petunjuk arah. Selanjutnya, setelah implementasi kebijakan yaitu menganalisis faktor-faktor implementasi kebijakan. Faktor-faktor implementasi kebijakan ini membandingkan empat pendapat tokoh dan hasil perbandingan tersebut terdapat enam faktor yaitu standart dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi,

sosial dan politik. Jadi operasionalisasi konsep pada penelitian ini yaitu mengenai konsep implementasi kebijakan aksesibilitas pengembangan pariwisata serta menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendorong.

#### **1.6.1 Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2025)**

Implementasi kebijakan aksesibilitas pariwisata dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rembang untuk periode 2019-2025 mencakup berbagai aspek pengembangan pariwisata. Bagian keempat dari peraturan ini membahas tentang pengembangan aksesibilitas pariwisata, sedangkan bagian kelima berfokus pada Prasarana Umum, Sarana Umum, dan Sarana Pariwisata. Secara khusus, membahas bagian keempat pembangunan aksesibilitas pariwisata serta Pasal 31, 32, dan 33 pada bagian kelima menetapkan kebijakan untuk pembangunan infrastruktur umum, fasilitas umum, dan fasilitas wisata. Pasal 31 membahas mengenai arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. Pasal 32 berbunyi strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi, pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata, serta penyediaan pembangunan yang sudah melampaui ambang batas daya dukung. Pasal 33 berbunyi pemberian insentif dalam

pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan komprehensif ini menjawab permasalahan yang teridentifikasi dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Rembang. Menguraikan tujuan dan sasaran dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk mengatur dan menyusun proses pelaksanaan kebijakan Pengembangan Wisata Pantai Pasir Putih Wates.

#### **1.6.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata**

Proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata tentu ada faktor penghambat dan pendukung. Untuk mengetahui faktor keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Pantai Pasir Putih Wates sebagai berikut:

##### **a. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Indikator ini merupakan suatu hal yang akan dicapai setiap program atau kebijakan. Agar kebijakan pengembangan pariwisata berhasil, standar dan sasarannya harus jelas dan terstruktur. Indikator kinerja bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana standar serta tujuan kebijakan sudah dicapai.

##### **b. Sumber daya**

Dalam menjalankan suatu kebijakan, sumber daya merupakan komponen terpenting. Sumber daya ini dapat membantu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya ini termasuk sumber daya

manusia, sumber daya finansial atau keuangan, dan sumber daya lain yang membantu pariwisata berjalan dengan baik.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana berpengaruh terhadap karakter organisasi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan. Karakter organisasi pelaksanaan terdiri dari struktur pelaksanaan kebijakan, siapa saja pihak yang ikut dalam implementasi kebijakan, dan wujud ikatan kerjasama dalam melakukan kebijakan tersebut

d. Sikap para pelaksana

Disposisi dari pelaksana terhadap pelaksanaan suatu kebijakan menjadi salah satu aspek yang memastikan sukses ataupun tidaknya Kebijakan dilaksanakan. Baik penerimaan atau penolakan kebijakan untuk dilaksanakan merupakan bagian dari disposisi pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan (dalam Mulyadi 2016:70) mencakup tiga hal penting, yaitu:

- Kognisi, yang mencakup pemahaman pelaksanaan kebijakan;
- Respon pelaksana terhadap kebijakan, yang bisa mempengaruhi niat mereka untuk menerapkannya;
- Intensitas disposisi pelaksana, yaitu keinginan pelaksana untuk bertindak.

e. Komunikasi Antar Organisasi

Pelaksana Komunikasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, Anggara (2014:250). Komunikasi dilakukan untuk menyamakan pandangan dan pendapat

dari pihak-pihak yang terlibat, keseragaman tindakan akan terjadi apabila komunikasi berlangsung dengan efektif. Penerapan kebijakan akan terbantu oleh komunikasi yang efektif. Sebaliknya, kegagalan komunikasi akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.. Apabila ketiga faktor tersebut tidak mendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka dapat menjadi sumber masalah yang menghambat jalannya implementasi kebijakan.

**Tabel 1.6 Operasionalisasi Konsep**

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati
1	Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates  Melihat isi kebijakan kepariwisataan yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Kabupaten Rembang Tahun 2019-2025	Pengembangan Aksesibilitas pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan sistem jaringan transportasi untuk kemudahan wisatawan</li> <li>b. sarana transportasi dikembangkan dan disediakan.</li> <li>c. Mekanisme anggaran yang disediakan untuk pembangunan aksesibilitas</li> </ul>
		Prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sedang dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas umum, fasilitas pariwisata, dan prasarana umum ditingkatkan dan dikembangkan</li> <li>b. Mekanisme anggaran yang disediakan untuk pengembangan dan pembangunan prasarana umum,</li> </ul>

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati
			<ul style="list-style-type: none"> <li>fasilias umum dan fasilitas pariwisata.</li> <li>c. Kerjasama antara aktor pemerintahan daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan fasilitas pariwisata.</li> <li>d. Proses pengendalian yang dilakukan terhadap prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata</li> </ul>
2	Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates	Standart dan Sasara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan/sasaran kebijakan pengembangan pariwisata</li> <li>b. Meningkatkan pendapatan masyarakat</li> <li>c. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan</li> </ul>
		Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber daya manusia atau unit pelaksanaan kebijakan</li> <li>b. Penyediaan anggaran dalam pengembangan pariwisata</li> <li>c. Penyediaan sarana dan prasarana umum untuk memenuhi kebutuhan wisatawan</li> </ul>
		Karakteristik Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur pelaksana kebijakan dan hubungan kerjasama antar pelaksana</li> <li>b. Peran dari setiap pelaksana yang terlibat</li> </ul>
		Disposisi Implementor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sikap pelaksana dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata</li> </ul>

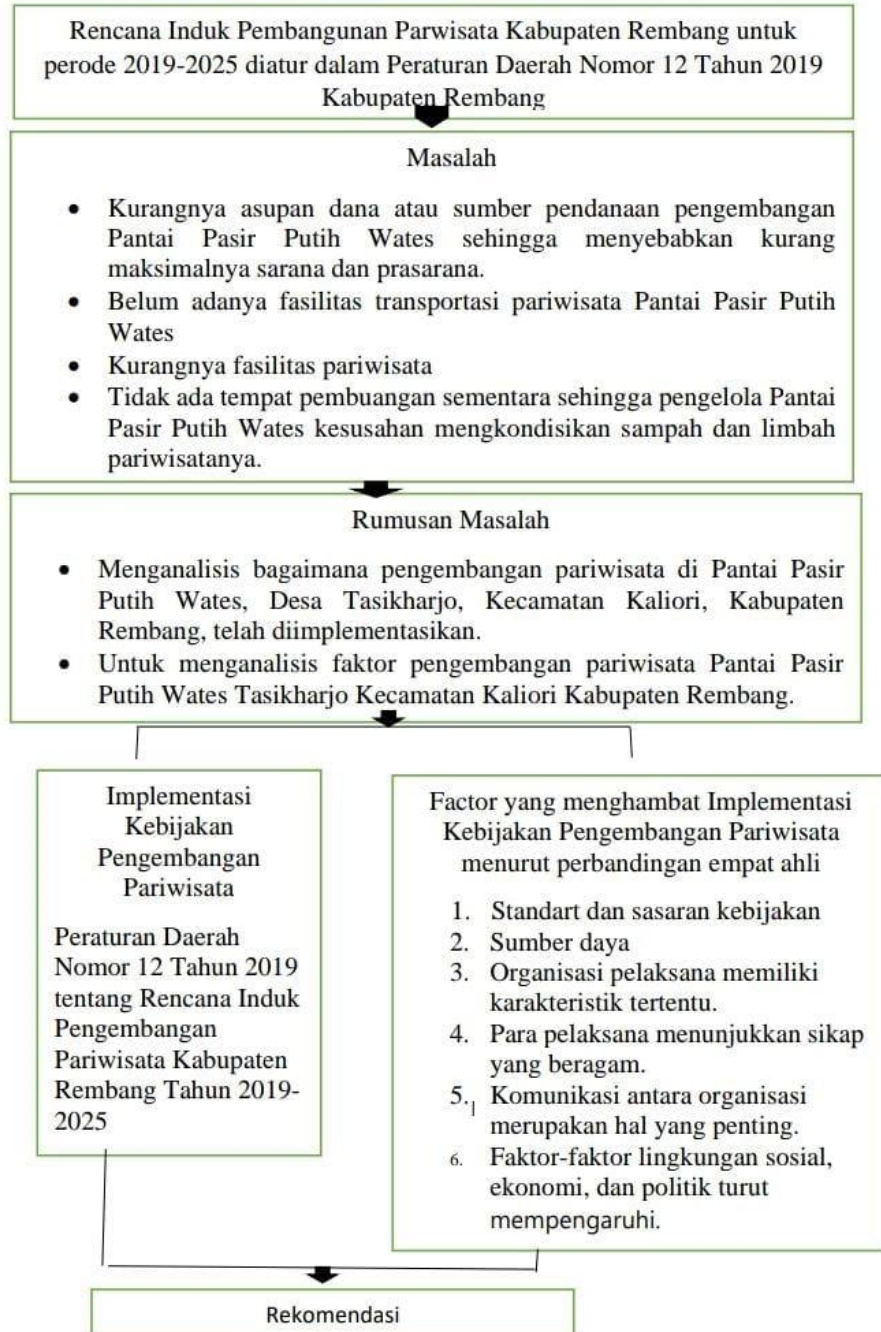
No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Respon pelaksana dalam menjalankan instruksi pengembangan pariwisata.</li> <li>c. Intensitas atau preferensi nilai yang ingin dimiliki implementor kebijakan Pengembangan Pantai Pasir Putih Wates</li> </ul>
		Komunikasi antar organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi kebijakan pengembangan pariwisata di Pantai Pasir Putih Wates kepada pengelola pariwisata/UPTD</li> <li>b. Koordinasi antara pelaksana dengan kelompok kepentingan serta pengelola pariwisata/UPTD dalam pengembangan pariwisata di Pantai Pasir Putih Wates.</li> </ul>
		Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan kelompok kepentingan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang</li> <li>b. Respon masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang.</li> <li>c. Dukungan kelompok kepentingan berupa dukungan public pengembangan pariwisata Pantai Pasir Putih Wates</li> </ul>

**Sumber: Analisis Peneliti**



## 1.7 Kerangka Berpikir

**Gambar 1.3 Bagan Kerangka Pikir**



Sumber: Analisis Peneliti

## **1.8 Argumen Penelitian**

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan yang dibahas merupakan implementasi kebijakan publik berupa kebijakan atau program pengembangan pariwisata Implementasi kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2019, yang mengatur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang untuk periode 2019-2025, terjadi di Pantai Pasir Putih Wates, Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliore, Kabupaten Rembang. Implementasi kebijakan dapat memastikan apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat dijalankan di lapangan serta keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2010: 9) merupakan metode untuk mempelajari keadaan tempat-tempat yang alami dan memperoleh informasi yang detail sebagai alat utama peneliti. Menurut Malo dan Trisnoningias (1999:9) penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya berupa gejala-gejala sosial tertentu sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan tentang masalah-masalah yang muncul. Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti akan mengeksplorasi dan menggali informasi dari pihak – pihak yang terlibat dengan mengajukan pertanyaan dan mencari data spesifik (Creswell, 2014).

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan pengembangan pariwisata Kabupaten Rembang di Pantai Pasir Putih Wates serta Menganalisis implementasi pengembangan pariwisata di Pantai Pasir Putih Wates.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Penelitian dilakukan di DISBUDPAR (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Kabupaten Rembang dan Pantai Pasir Putih Wates. Dipilihnya Pantai Pasir Putih Wates karena Pantai Pasir Putih Wates merupakan salah satu Pantai unggulan di Kabupaten Rembang yang terdapat masalah pengembangan pariwisatanya yang semakin tahun menurun karena adanya wisata-wisata baru yang berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan, serta pemeliharaan tanaman.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subyek penelitian ini meliputi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Rembang. Subjek penelitian ini dipilih secara strategis untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai strategi pengembangan, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pengembangan pariwisata di Pantai Pasir Putih Wates. Untuk mendapatkan data kualitatif, para peneliti melibatkan dua informan kunci untuk memberikan wawasan dan perspektif yang berharga:

1. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan PAriwisata Kabupaten Rembang

2. Pengelola Pantai Pasir Putih Wates
3. Swasta (Pedagang di Pantai Pasir Putih Wates)
4. Wisatawan

Dipilihnya empat informan kunci tersebut karena informan di atas mengerti terhadap strategi pengembangan pariwisata yang dilakukan di Kabupaten Rembang khususnya di Pantai Pasir Putih Wates yang nantinya dapat menunjang penelitian ini. Adapun informan pendukung dari masyarakat setempat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Pantai Pasir Putih Wates.

#### **1.9.4 Jenis Data**

Penulis menggunakan data kualitatif dalam penelitian ini. Menurut Lofland dan Lofland (dikutip dalam Moloeng, 2010: 157), sumber utama data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, serta meliputi data tambahan seperti dokumen dan materi tambahan. Selain itu, data yang digunakan juga mencakup frasa, simbol, foto, dan statistik yang secara jelas menggambarkan atau merepresentasikan individu, tindakan, dan peristiwa. tertulis untuk mendeskripsikan implementasi pengembangan pariwisata Kabupaten Rembang di Pantai Pasir Putih Wates serta Strategi pengembangan pariwisata yang dipersiapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Rembang serta pengelola Pantai Pasir Putih, bergantung pada elemen-elemen yang berbeda untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat pariwisata di Pantai Pasir Putih.

### **1.9.5 Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data berikut.

1. Data Primer: Wawancara dilakukan kepada berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan wisata Pantai Pasir Putih Wates. Antara lain berdiskusi dengan pengelola pantai, pedagang swasta yang beroperasi di Pantai Pasir Putih Wates, perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang (DISBUDPAR), dan wisatawan. Wawancara ini berfungsi sebagai sarana utama pengumpulan data langsung untuk penelitian ini.
2. Data Sekunder: Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pariwisata, arsip resmi, dokumen, dan dokumentasi foto. Sumber-sumber sekunder ini menyumbangkan konteks tambahan dan informasi latar belakang untuk mendukung penelitian.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi

Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Rembang. Untuk melakukan penelitian ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Rembang melakukan analisis dan dokumentasi semua aspek yang berkaitan dengan pengembangan

pariwisata, serta faktor pendukung dan penghambat dari strategi yang digunakan..

## 2. Wawancara

Dalam melakukan wawancara untuk penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang fleksibel dan tidak terstruktur, tanpa format yang telah ditentukan. Daripada mengikuti serangkaian pertanyaan yang tetap, serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan diperkenalkan selama proses wawancara. Meskipun penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, terdapat pedoman yang menjelaskan poin-poin spesifik yang harus dibahas dengan sumber yang relevan. Untuk memenuhi kebutuhan penelitian akan respons yang terperinci dan luas, pertanyaan terbuka digunakan untuk mendorong wawasan komprehensif yang melampaui jawaban ringkas.

## 3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan Pantai Pasir Putih Wates.

### **1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data penulis, yang mencakup sumber primer dan sekunder, dilakukan melalui berbagai tahapan penelitian, termasuk analisis data kualitatif. Mengikuti Sugiyono (2011: 246), sebagaimana dikutip oleh Miles

dan Huberman (2007: 26), proses analisis data kualitatif dibagi menjadi tiga tahap:

a) Reduksi Data

Reduksi Data: Tahap awal ini melibatkan proses merangkum, membuat prioritas, memusatkan perhatian pada aspek-aspek utama, dan mengidentifikasi tema dan pola dalam data. Komponen-komponen yang termasuk dalam reduksi data adalah sebagai berikut:

- Proses pemilihan data berdasarkan kepentingan dan hubungan masing-masing kelompok data.
- Mengatur data ke dalam tipe unit tertentu dan mengelompokkan data ke dalam unit tersebut juga bisa menjadi fungsi kelas/variabel.
- Kode data sesuai dengan *grid* kerja penelitian

Pada fase ini, peneliti menyeleksi informasi yang diterimanya dari lapangan. Tergantung pada fokus penelitian, bahan dipilih dari bahan primer dan data sekunder.

b) Penyajian Data (Display)

Menurut Miles dan Huberman (1992:14), data merupakan informasi terorganisir yang dikumpulkan untuk menyusun kesimpulan dan mengarahkan tindakan. Wawancara mendalam yang dilakukan terhadap warga masyarakat menghasilkan data yang menjadi dasar pengambilan kesimpulan, yang dapat disajikan secara naratif atau deskriptif. Penyajian informasi merupakan aspek yang tidak terpisahkan bagi peneliti dan tidak bisa dilepaskan dari proses penarikan kesimpulan. Pentingnya bagi peneliti

untuk menyajikan informasi secara simultan atau sistematis sedemikian rupa sehingga memudahkan pemanfaatannya untuk menjelaskan atau menjawab topik yang diteliti (Iskandar, 2008: 223).

#### c) Menarik atau Memverifikasi Kesimpulan

Tahap terakhir dalam proses analisis data, seperti diuraikan oleh Miles dan Huberman, melibatkan penarikan atau konfirmasi kesimpulan. Setelah proses reduksi data selesai, seluruh dataset mengalami bentuk representasi data. Data yang disajikan membentuk narasi yang berfungsi untuk menjelaskan temuan penelitian, mencakup kesimpulan atau verifikasi data yang dilakukan peneliti.

Dimulai dengan pengumpulan data penting melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam proses penelitian, sifat saling terkait dari ketiga tahap analisis dan interpretasi data terlihat jelas. Data yang diperoleh selanjutnya diringkas atau dirangkum dengan menekankan pada detail krusial terkait dengan subjek kajian, khususnya implementasi peraturan pembangunan di Pantai Pasir Putih Wates. Pasca reduksi data, hasilnya disajikan dalam bentuk teks naratif, yang pada akhirnya mengarah pada penarikan kesimpulan berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan.

### **1.9.8 Kualitas Data**

Untuk memvalidasi data kualitatif dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan. Untuk meningkatkan keandalan data dalam penelitian kualitatif, triangulasi teknik ini dilakukan. Spesifik, penelitian ini menggunakan



triangulasi sumber; dengan kata lain, berbagai sumber data dikumpulkan melalui teknik wawancara yang sama.. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang terkait erat dengan pelaksanaan pengembangan pariwisata dan faktor penghambat pengembangan Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang.